

**IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN HAK ANGKET BERDASARKAN
HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Alfiando Hutajulu

Nim : 1440050014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

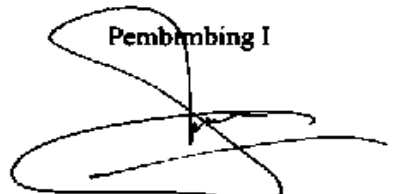
2018

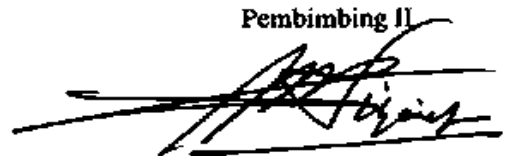
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Alfiando Hutajulu
NIM : 1440050014
Program Kekhususan : Hubungan Ketatanegaraan dan Masyarakat
Judul Skripsi : Implementasi dan Pengaturan Hak Angket
Berdasarkan Hak-Hak Dewan Perwakilan
Rakyat dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Disetujui

Pembimbing I

(Chandra Aritonang, SH., MH)

Pembimbing II

(Poltak Siringoringo, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hubungan Ketatanegaraan dan Masyarakat


(Poltak Siringoringo, SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN HAK ANGKET BERDASARKAN
HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Alfiando Hutajulu

NIM : 1440050014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

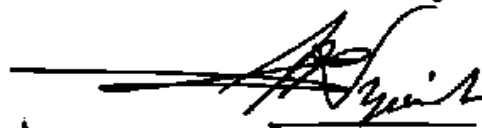
Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I



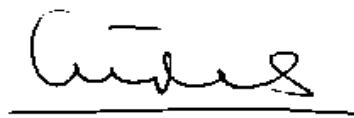
(Chandra Arintonang, SH., MH)

Dosen Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, SH, MH)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Gindo E.L Tobing, SH, MH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu penulisan skripsi ini merupakan suatu keinginan dari penulis untuk memberikan kontribusinya yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai **Implementasi dan Pengaturan Hak Angket Berdasarkan Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Hukum Tata Negara** Penulis berharap penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis senantiasa berharap kepada siapa saja yang berminat untuk meneruskan penelitian tentang masalah serupa nantinya dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkannya.

Jakarta, Agustus 2018

Penulis

(Alfiando Hutajulu)

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan sesuai waktu yang ada. Tetapi atas dukungan doa, semangat dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada Hotman Madya Hutajulu dan Sri Mulyani Selaku Orang Tua Penulis. dan Ramos Hutajulu selaku abang dari penulis. Terimakasih sudah mendidik, membiayai kuliahku serta memberikan dukungan, doa kepada penulis. Mereka adalah semangat bagi saya dalam melakukan penulisan hukum ini. Tuhan Yesus Memberkati
2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum yang Telah membimbing kami selaku mahasiswa/I selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang, SH, MH selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Poltak Siringoringo, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.
6. Kepada seluruh dosen yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan semasa kuliah di Fakultas Hukum UKI.
7. Kepada seluruh kawan-kawan FH UKI 2014 terimakasih telah melengkapi cerita kuliah penulis selama di Fakultas Hukum UKI, terimakasih atas pengalaman, hiburan, kekompakan dan masih banyak hal yang tidak bisa

penulis sebutkan satu per satu biarlah itu menjadi catatan sejarah bagi kita semua. Semangat dan sukses selalu!

8. Kepada Saudara/i di UKM Suara Mahasiswa semangat terus, berjuang terus dalam perkuliahan dan organisasinya.. angkat dan harumkan nama UKM Suara Mahasiswa FH UKI! Siapa Kita??? SM!!!
9. Kepada yang Terkasih Lashissaria Manalu yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Love!
10. Kepada Kawan-Kawan di GMNI semangat dan sukses selalu, terus pertahankan yang perlu dipertahankan. Ingat jangan sikut sana sini hehe. Terus Berjuang Bung!
11. Kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terutama untuk staf karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu berada di garis depan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum. Terimakasih dan sukses selalu.

Jakarta , Agustus 2018
Penulis

Alfiando Hutajulu

ABSTRAK

IMPELEMENTASI DAN PENGATURAN HAK ANGKET BERDASARKAN HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

OLEH

ALFIANDO HUTAJULU

14.400.500.14

Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga negara yang masuk kedalam ranah legislatif karna dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada hakikatnya ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya. Misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang.

Penelitian ini termasuk metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang diperoleh.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara independen yang masuk kedalam ranah eksekutif, timbulnya lembaga negara independen tersebut banyak membawa implikasi terhadap posisi institusional, independensi lembaga negara independen, hubungan dengan lembaga negara lainnya, politis ketegangan hubungan dengan DPR dan pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen. KPK sendiri melakukan pelaksanaan suatu Undang-Undang yang merupakan hasil dari produk DPR tersebut sehingga DPR berhak melakukan pengawasan melalui Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang secara khusus KPK melakukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Hak Angket, Impelementasi terhadap Lembaga Negara Independen

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat	13
2.1.1 Masa Sebelum Kemerdekaan Volksraad (1918-1942)	14
2.1.2 DPR Pada Masa Orde Lama	15
2.1.3 DPR Pada Masa Orde Baru	17
2.1.4 DPR Pada Masa Reformasi	18
2.2 Peran dan Wewenang DPR	20
2.3 Pengertian Hak Angket	22

2.3.1	Sebab Timbulnya Hak Angket	25
2.3.2	Landasan Hak Angket	
	1. Landasan Filosofis	27
	2. Landasan Sosiologis	28
	3. Landasan Hukum	29
2.3.3	Pandangan Fraksi-fraksi DPR tentang Hak Angket	
	1. Eksistensi Hak Angket	31
	2. Tujuan dan Kegunaan Hak Angket	32
	3. Kemungkinan Penggunaan Hak Angket	34
3.3	Penggunaan Hak Angket DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945	
3.3.1	Kekuasaan DPR Pasca Amandemen UUD 1945	41
3.3.2	Kekuasaan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Menurut UUD NKRI 1945 Pasca Amandemen beserta Peraturan Perundang-Undangan .	45
4.4	Lembaga Negara	
4.4.1	Definisi Lembaga Negara	50
4.4.2	Teori Tujuan Lembaga Negara.....	52
4.4.3	Struktur Lembaga Negara	53
4.4.4	Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu	55
5.5	Komisi Negara Independen	
5.5.1	Latar Belakang Keberadaan Komisi Negara Independen	58
5.5.2	Legitimasi Kewenangan Komisi Negara Independen	60
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Pengaturan dan Implementasi Penggunaan Hak Angket DPR	62
	1. Analisa Penelitian	74
B.	Implementasi Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	72
	1. Implikasi pada Posisi Institusional Lembaga Negara Independen	79

2. Implikasi pada Independensi Institusional Lembaga Negara	
Independen	80
3. Implikasi pada Hubungan dengan Lembaga Negara Lainnya	83
4. Implikasi Politis Ketegangan Hubungan pada DPR	86
5. Implikasi pada Pengawasan Kelembagaan	90
6. Analisa Penelitian	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101